

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memaparkan bahwasanya kenaikan kesejahteraan umum masyarakat merupakan satu dari sekian tujuan utama pembangunan nasional Indonesia. Kesejahteraan umum bermakna terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk, baik material, spiritual, ataupun sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup layak, mengembangkan potensi diri, dan menjalankan fungsi sosial serta ekonomi mereka dalam masyarakat. Tingkat kemiskinan di Indonesia adalah satu dari sekian ukuran kesejahteraan secara keseluruhan. Ada hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dan kesejahteraan; semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, sebab lebih banyak penduduk yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak dan berkontribusi secara produktif.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan masih menjadi hambatan yang signifikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki populasi miskin yang cukup besar sehingga memerlukan upaya penanganan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasinya. Permasalahan kemiskinan adalah masalah rumit yang melibatkan sejumlah dimensi kehidupan. Akibatnya, usaha untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan secara holistik, dengan melibatkan sejumlah sektor yang saling terkait, serta diimplementasikan secara terkoordinasi agar bisa memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat yang paling rentan pada kemiskinan (World Bank, 2019). Upaya untuk meminimalisir kemiskinan bermaksud untuk mewujudkan visi bangsa, yakni terciptanya masyarakat yang

sejahtera dan adil. Hal ini menjadi landasan penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan tujuan-tujuan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

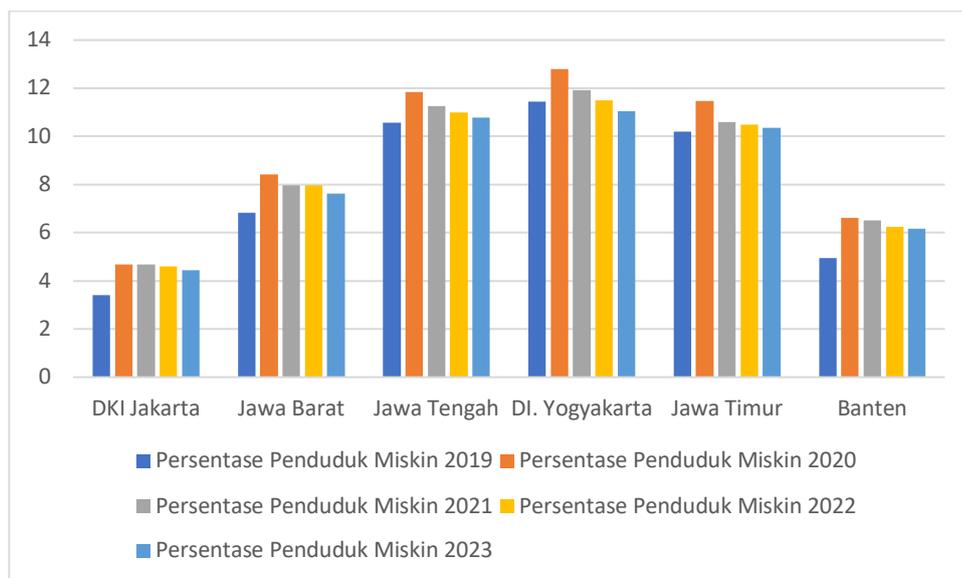
Kemiskinan Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi yang mendapat pengaruh dari sejumlah faktor, termasuk dampak signifikan dari pandemic COVID-19. Kemiskinan dianggap sebagai masalah dasar dan penyakit nasional di Indonesia (Purwanto et al., 2020); (Effendy, 2017). Pada tahun 2019, presentase penduduk miskin berada di sekitar 9,22%, tetapi pandemic memicu lonjakan angka kemiskinan hingga mencapai 10,14% pada tahun 2021. Krisis kesehatan global ini membawa dampak ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran dan penurunan pendapatan, yang berkontribusi besar pada kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Tetapi indikasi awal pemulihan ekonomi dan efektivitas upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi diperlihatkan dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, yakni mencapai 9,54% pada awal tahun 2022. Angka kemiskinan kembali turun menjadi 9,36% pada tahun 2023, menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan dan kemajuan yang mantap dalam berbagai inisiatif penanggulangan kemiskinan..

Kemiskinan suatu negara adalah masalah rumit yang melibatkan sejumlah variabel. Satu dari sekian elemen yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah modal manusia, yang memuat aspek kesehatan dan pendidikan. Kesehatan yang baik menjadi syarat dasar untuk meningkatkan produktivitas, sementara kesuksesan pendidikan juga sangat bergantung pada situasi kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, individu lebih mudah mencapai

kenaikan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan individu yang lebih siap untuk berkontribusi secara maksimal dalam ekonomi. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, program pembangunan harus berkonsentrasi pada inisiatif untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara kolektif (Todaro & S. C. Smith., 2003).

Berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dijumpai bahwa selama periode 2019 – 2023 angka presentase Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa didominasi oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen) Di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS (2023), data diolah

Diperhatikan dari persentase tingkat penduduk miskin, dalam data diperlihatkan angka tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih lebih dari kelima Provinsi yang ada di Provinsi Jawa. Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi pusat perekonomian Indonesia. Tetapi, meskipun berperan sebagai pusat ekonomi, dampak perkembangan ekonomi itu belum sepenuhnya menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di pulau ini. Di antara provinsi-provinsi di Jawa,

Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dalam hal presentase kemiskinan tertinggi. Masalah sosial, budaya, dan ekonomi makro merupakan penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

Di tingkat provinsi di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah unik yang memadukan rezim Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan Yogyakarta. Samudra Hindia di sebelah selatan dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara membatasi provinsi ini, yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. DIY membentang seluas 3.185,80 km² dan diperintah oleh lima wilayah administratif: Kota Yogyakarta, satu-satunya kotamadya, dan empat kabupaten (Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul). Dengan tingkat kemiskinan sebanyak 15,60%, Kabupaten Gunungkidul merupakan kota atau kabupaten termiskin kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesudah Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki proporsi tertinggi sebanyak 15,64%. Di lain sisi, Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah sebanyak 6,49%. Bila melihat perbedaan angka kemiskinan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, ada rentang persentase yang cukup besar. Ini memperlihatkan adanya ketidakmerataan ekonomi yang jelas antara kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menimbulkan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Negara-negara berkembang sering kali menghadapi dua masalah berikut ini Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Gambar 1.2 Ketimpangan Pendapatan



Sumber : Bappeda DI Yogyakarta (2024), data diolah

Indeks *Gini Ratio* yang berada pada kisaran 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna) dipakai untuk mengukur tren ketimpangan pendapatan di DI. Yogyakarta selama beberapa dekade terakhir. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak merata pendapatan di suatu wilayah. Dalam gambar 1.1 dimana pada tahun 2009 – 2013, ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun-tahun khusus, ketimpangan sedikit menurun, seperti pada tahun 2014, 2016, dan 2019.

Ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kontribusi besar pada tingginya tingkat kemiskinan di wilayah itu. Kemiskinan dan ketidaksetaraan memiliki hubungan praktis, yakni bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (J. Handoyo Mulyo & Natalia Seleky, 2015). Dalam hal ini diperlihatkan sebab kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkaitan erat: semakin besar ketimpangan, semakin individu berpenghasilan rendah mengalami

kesulitan untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Hal ini terlihat pada situasi di DI. Yogyakarta, di mana ketimpangan semakin mengalami kenaikan sesudah pandemi COVID-19, yang berdampak lebih berat pada pekerja sektor informal dan kelompok berpendapatan rendah yang memiliki kerentanan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal.

Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh terbatasnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, kelompok ekonomi atas lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya itu, sehingga mobilitas sosial bagi masyarakat miskin tetap terhambat, dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan juga terbatas.

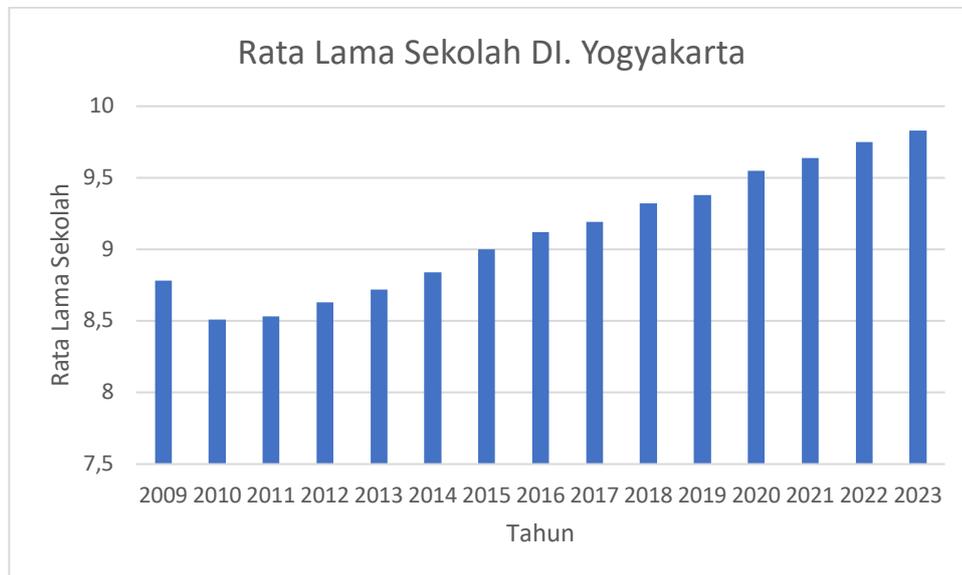
Kemiskinan sudah menghambat kemajuan ekonomi, membatasi akses pada layanan publik, menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan menyulitkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan (Bangun, 2020).

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Terkait dengan hal itu, mengatasi kemiskinan sangat mendapat pengaruh dari tingkat pendidikan individu. Tetapi, bila kemiskinan tidak diberantas, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi sebab dunia kerja modern membutuhkan sumber daya yang kompetitif dan berkualitas tinggi. ((Valiant Kevin et al., 2022).

Dalam gambar 1.3. dimana kenaikan rata lama sekolah memperlihatkan adanya perbaikan dalam akses dan kesempatan pendidikan di DI. Yogyakarta. Kenaikan rata-rata lama sekolah mencerminkan Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan standar dan jumlah sekolah, seperti lewat program wajib belajar dan

bantuan pendidikan. Dalam hal ini, hal ini memperlihatkan bahwa rakyat suatu negara adalah aset yang sesungguhnya (UNDP, 2004).

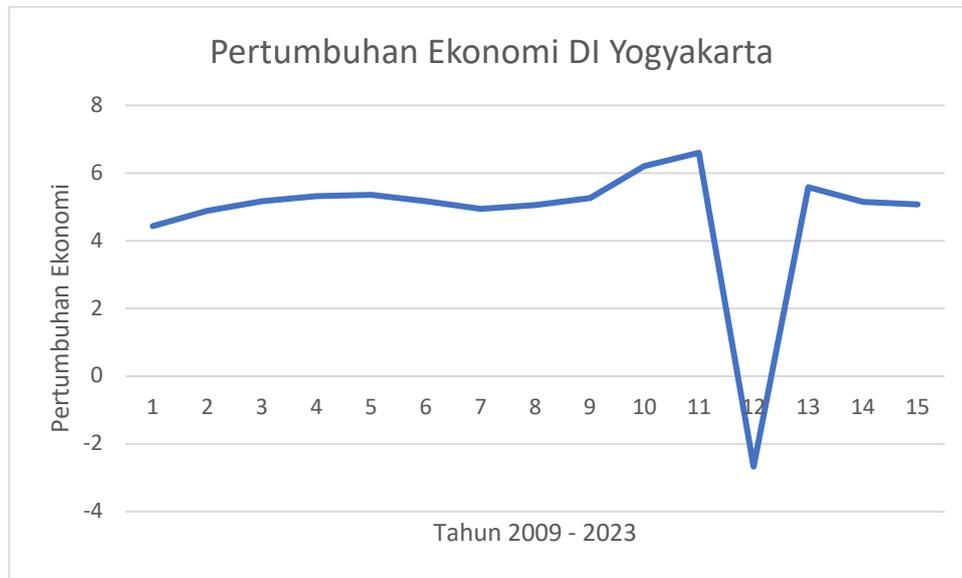
Gambar 1.3 Rata Lama Sekolah DI. Yogyakarta



Sumber : Bappeda DI Yogyakarta (2024), data diolah

Sebagai satu dari sekian faktor dalam pengurangan kemiskinan di suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting untuk menilai kesuksesan pembangunan. Hal itu didukung oleh pernyataan Bappenas (2018), yakni pertumbuhan ekonomi menjadi satu dari sekian faktor pendorong menurunnya kemiskinan. Sukirno memaparkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya kegiatan ekonomi yang menghasilkan kenaikan barang dan jasa yang yang dihasilkan dalam masyarakat dan kenaikan kesejahteraan umum. Di lain sisi, Todaro dan Smith menyatakan dalam (Tempone et al., 2020) Proses di mana kemampuan produktif ekonomi tumbuh dari waktu ke waktu dengan maksud agar pendapatan tambahan tinggi bisa dihasilkan dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi DI Yogyakarta



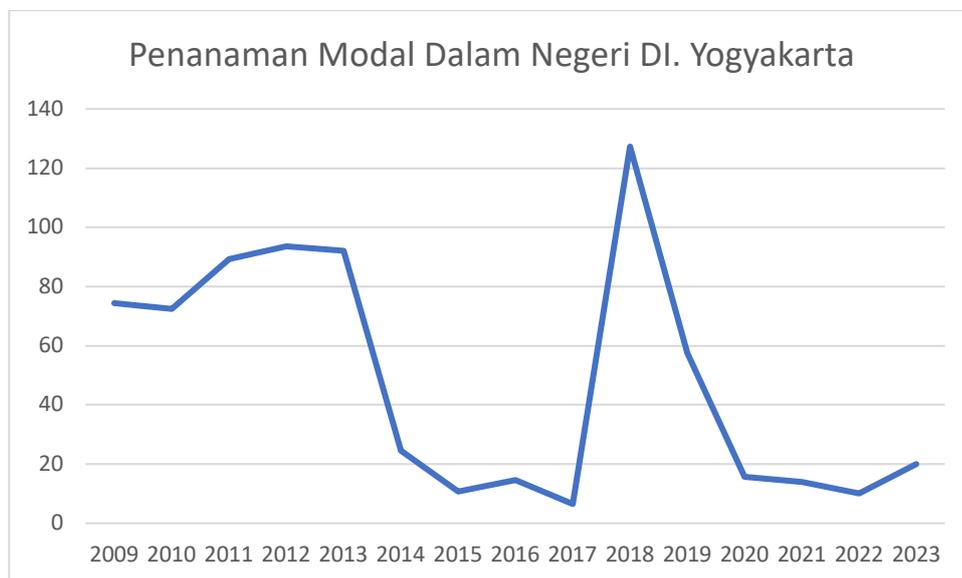
Sumber : Bappeda DI Yogyakarta (2024), data diolah

Berdasarkan gambar 1.4. bisa diambil kesimpulan bahwa tren pertumbuhan ekonomi DI. Yogyakarta memperlihatkan kinerja yang cukup baik selama periode tahun 2019 – 2023, dengan sejumlah fluktuasi. Pada tahun ke-12 yaitu tahun 2020, sudah terjadi penurunan yang mencolok. Penurunan ini disebabkan oleh pandemic COVID-19 dan sejumlah faktor situasi global yang berdampak pada perekonomian DI. Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi stabil yang tidak mengalami fluktuasi tajam ini mengindikasikan adanya pertumbuhan berkelanjutan dan tidak terlalu mendapat pengaruh dari shock eksternal yang signifikan. Meskipun DI. Yogyakarta mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan di wilayah ini tetap tinggi. Satu dari sekian penyebabnya adalah distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Investasi adalah bagian penting dari ekonomi modern. Dalam hal sumber daya modal, investasi adalah segala aktivitas yang membantu perekonomian dengan mendatangkan uang baik dari sumber domestik ataupun asing. Investasi

merupakan kegiatan penanaman modal sebagai kebijakan untuk mengatasi defisit anggaran negara dan neraca pembayaran serta untuk menghasilkan sumber pendapatan negara. Investasi adalah kontribusi pada kemajuan ekonomi yang dijalankan oleh investor domestik dan asing. Dalam hal ini, perekonomian mendapat manfaat besar dari investasi dalam negeri untuk meminimalisir angka kemiskinan (Elilian, 2021).

Gambar 1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri DI. Yogyakarta



Sumber : Bappeda DI Yogyakarta (2024), data diolah

Berdasarkan gambar 1.5. dimana nilai fluktuasi PMDN DI. Yogyakarta cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tidak ada tren linear yang jelas, baik kenaikan ataupun penurunan yang konsisten. Pada tahun 2018, ada lonjakan investasi yang cukup tajam memperlihatkan kenaikan sangat tinggi, tetapi sesudah mencapai puncaknya, nilai PMDN mengalami penurunan yang cukup drastis dimulai pada tahun 2019 hingga beberapa tahun berikutnya.

Data yang disabilan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan permasalahan multidimensional yang

mendapat pengaruh dari sejumlah elemen, termasuk ketimpangan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi investasi. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel-variabel itu pada tingkat kemiskinan di DIY menggunakan data panel selama periode 2009-2023. Diharapkan bahwa temuan-temuan dari investigasi ini akan memberikan dukungan empiris bagi terciptanya model prediksi kemiskinan dan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan hal itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan studi lebih lanjut terkait hubungan sebab-akibat dari elemen-elemen makroekonomi di Provinsi DI Yogyakarta untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan analisis itu, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Determinasi Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diturunkan, yakni:

1. Apakah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pengaruh dari Ketimpangan Pendapatan?
2. Apakah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pengaruh dari Rata Lama Sekolah?
3. Apakah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi?

4. Apakah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pengaruh dari Penanaman Modal Dalam Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut ini selaras dengan rumusan masalah dan latar belakang:

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang diterima kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Ketimpangan Pendapatan.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang diterima kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rata Lama Sekolah.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang diterima kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Pertumbuhan Ekonomi.
4. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang diterima kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Penanaman Modal Dalam Negeri.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian perlu memiliki batasan. Dalam hal ini, batasan dalam ruang lingkup penelitian, yakni:

1. Penelitian ini merupakan data series yang memuat informasi dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.
2. Penelitian ini menggunakan variable ketimpangan pendapatan, rata lama sekolah, ekspansi ekonomi dan investasi domestik sebagai variable bebas, dan kemiskinan sebagai variable terikat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut ini adalah keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman dan informasi pada pemerintah setempat untuk dapat merancang dan memperkuat kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan, perbaikan kurikulum pendidikan, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan regulasi investasi yang inklusif. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan pajak progresif, program bantuan sosial berbasis data DTKS, perluasan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan vokasi, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, serta insentif bagi investasi yang menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
2. Temuan-temuan dari studi ini diharapkan bisa memajukan pemahaman kita terkait bagaimana kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pengaruh dari faktor-faktor seperti rata-rata lama pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi domestik.